



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Sokan, 08 Juni 1983 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Sokan, 02 Oktober 1990 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 16 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalil (Posita) Permohonan para Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun 4 (empat) bulan dan Pemohon II dalam usia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak Alamsyah, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayan, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Sujianto dan Sam'an;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Pandan Desa Nanga Soka Kecamatan Soka Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian terakhir Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Pandan Desa Nanga Soka Kecamatan Soka Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Alamsyah, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, dikarenakan para Pemohon pada saat itu masih awam dan kurang informasi mengenai menikah serta jarak tempuh ke KUA sangat jauh, sehingga para Pemohon memilih untuk menikah secara siri saja, Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Nomor B-24/Kua.14.11.05/PW.01/2/2024 Tanggal 27 Februari 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Nila binti Syahbudin, lahir di Nanga Sokan, 27-07-2010
Jenis Kelamin : Laki-laki, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Rahmat Ito bin Syahbudin, lahir di Nanga Sokan, 25-11-2014
Jenis Kelamin : perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

12. Bahwa para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Desa Nanga Soka, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi,
Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 464/71/D-NS/PEM/2024 Tanggal 27
Februari 2024;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya
sebagai berikut:

Petitum

Primer

1.
Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2.
Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan
Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Senin, tanggal 31
Agustus 2009 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Pandan
Desa Nanga Soka Kecamatan Soka Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat;
3.
Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp,
tanggal 25 April 2024 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan
ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah. Oleh karena berdasarkan pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara Para Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I.,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

TTD

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul
Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 0,00
b.	Panggilan Pertama P & T	: Rp 0,00
c.	Redaksi	: Rp 0,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp 0,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp 0,00
Jumlah		: Rp 0,00

(Nol rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)